



“LMAN Antusias Untuk Mendorong Percepatan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL)”

LMAN melaksanakan peran sebagai pihak perwakilan pemerintah untuk menjadi penggerak perwujudan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL). Pengembangan KEKAL merupakan salah satu amanat negara yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan khususnya di kawasan ex LNG Arun, di Lhokseumawe, Aceh Utara.

Lembaga Manajemen Aset Negara sebagai Operator Pengelola Barang berkewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian serta monitoring penggunaan BMN Kilang LNG Arun sebagai bagian dari KEKAL agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk memetakan potensi ekonomi KEKAL, LMAN mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Kota Lhokseumawe, PT Patriot Nusantara Aceh (PT PATNA), Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Aceh (KPKNL Aceh) dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). FGD dilakukan selama tiga hari, sejak tanggal 29 Januari hingga 31 Januari 2019 di Hotel JW Marriott, Jakarta.

“Tanggungjawab atas keberhasilan KEKAL harus disadari sebagai kewajiban seluruh pihak yang terkait di dalamnya. PT PATNA dari sisi internal badan usaha mempunyai peran untuk mengupayakan perencanaan pembangunan Kawasan yang feasible. Di sisi lain, hal ini membutuhkan dukungan baik Pemerintah Pusat maupun Daerah kaitannya dengan penetapan kebijakan-kebijakan strategis agar KEKAL menjadi Kawasan yang investor friendly namun tetap pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku”, ujar Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam pidatonya pada FGD yang berlangsung di Jakarta tersebut.

Selain itu, Wakil Menteri Keuangan juga mengingatkan bahwa perwujudan KEKAL harus melibatkan sinergi dan koordinasi seluruh pihak terkait, termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Aceh, PATNA, dan investor. Berbagai permasalahan yang timbul harus dilihat sebagai tantangan yang memerlukan tekad dan komitmen untuk diselesaikan. Aspek sosial budaya masyarakat setempat juga merupakan hal yang tidak bisa ditinggalkan dalam menyusun rencana pengembangan Kawasan.

Ada tiga tema besar yang dibahas dalam *Focus Group Discussion*, yaitu *Investor Friendly*, Pengembangan Kawasan, dan Regulasi. Beberapa hal yang menjadi pembahasan di antaranya adalah masalah perizinan, adat istiadat masyarakat Aceh, harga sewa fasilitas di kilang LNG Arun yang dinilai terlalu mahal, efektivitas biaya pemeliharaan dan pengamanan aset, koordinasi antara LMAN dan instansi terkait, kebutuhan infrastruktur untuk meningkatkan SDM di daerah sekitar, fasilitas pendukung, serta insentif pajak dan bea cukai. Dengan banyaknya tantangan yang dihadapi LMAN, diperlukan sinergi dan koordinasi lebih lanjut untuk mengimplementasikan upaya penyelesaiannya.

Pada kesempatan ini pula Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari juga menyampaikan, “KEKAL harus segera terwujud, untuk itu diperlukan komitmen dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. LMAN mendukung dan turut mendorong penciptaan manfaat ekonomi dan manfaat sosial bagi kepentingan umum di wilayah Aceh melalui optimalisasi aset negara di KEKAL.”

Keberhasilan pembangunan dan pengelolaan KEKAL merupakan harapan baru bagi masyarakat Aceh, khususnya Kota Lhokseumawe, setelah berhenti beroperasinya PT ARUN LNG. Berbagai upaya dari seluruh

pihak perlu diwujudkan dalam rangka mensukseskan pembangunan dan pengembangan KEKAL. Kesadaran dari seluruh pihak terkait terhadap tantangan yang dihadapi dalam upaya pembangunan dan pengembangan KEKAL merupakan langkah awal menuju kesuksesan pembangunan dan pengembangannya.

Sebelumnya, kilang Arun ditetapkan sebagai Barang Milik Negara sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara dan telah diserahkan kepada LMAN berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-114/KN/2016 tanggal 22 Februari 2016.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017, kawasan kilang LNG Arun telah ditetapkan menjadi KEKAL dengan luas keseluruhan mencapai 2.622,48 ha yang didalamnya termasuk kawasan Kilang Arun seluas 1.840 ha yang merupakan aset kelolaan LMAN.

Tahun 2019 merupakan tahun kedua sejak KEKAL ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam upaya pengelolaan KEKAL, pada tahun 2018 telah dibentuk PT PATNA yang bertugas mengembangkan dan mengelola KEKAL. PT PATNA sebagai pengelola KEKAL diharapkan akan mampu mendukung ketersediaan dan ketahanan energi nasional, yang juga akan berdampak signifikan pada peningkatan perekonomian masyarakat Aceh.

PT Arun LNG beroperasi sejak 14 Oktober 1978 dan menghentikan operasional pada 15 Oktober 2014. Meskipun telah tidak beroperasi, masih banyak aset perusahaan ini yang bisa dioptimalkan, terutama fasilitas yang berada di kilang (*plant site*) dan di kompleks perumahan karyawan (*community site*). Aset di *plant site* yang masih bisa dioptimalkan di antaranya adalah *condensate tank*, *power generator*, turbin gas, LNG jetty, LPG jetty dan LPG tank. Sedangkan di *community site*, aset-aset yang bisa dioptimalkan berupa ratusan rumah, lapangan golf, kolam renang, stadion, lapangan tenis, gedung asrama (*dormitory*), gedung serbaguna, danau rekreasi dan *club house*. LMAN juga telah berupaya untuk memberikan manfaat sosial dari optimalisasi aset di Arun dengan meminjamkaikan Rumah Sakit Arun ke Pemerintah Kota Lhokseumawe. Diharapkan, masyarakat Aceh khususnya Arun akan memperoleh manfaat dan peningkatan kesejahteraan sosial dengan adanya kerjasama tersebut.

Sekilas Tentang LMAN

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) adalah salah satu **Special Mission Vehicles (SMV)** Kementerian Keuangan yang berbentuk BLU untuk mendukung optimalisasi manajemen aset negara guna meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial serta menggali potensi **return on asset** dan PNBP. Dalam menjalankan perannya LMAN melakukan aktivitas peningkatan status aset negara hingga pemasarannya, termasuk melakukan layanan konsultasi aset negara (*advisory*) kepada Kementerian/Lembaga/BLU dan instansi yang mengelola aset negara lainnya. Selain itu, LMAN juga diberi mandat akselerator pembangunan infrastruktur melalui pendanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional.

Humas Lembaga Manajemen Aset Negara:

Email : info.lman@kemenkeu.go.id

telepon: (021) 2123 1235